

DARI IMIGRASI MENUJU INTEGRASI: PERANAN ETNIS JAWA DALAM POLITIK DI SURINAME (1991- 2015)

Acep Rahmat, Nana Supriatna, Eryk Kamsori

Universitas Pendidikan Indonesia

ABSTRACT

This bachelor thesis titled “The political role of Javanese Ethnic in Suriname (1991- 2015), the main issues raised in this research is “How was the political role of Javanese ethnic in Suriname 1991- 2015?”. The main problem in this thesis divided into four questions, namely: (1) Why did Javanese Ethnic interested in Suriname’s politics? (2) How was the political development in Suriname in 1991- 2015? (3) How was the contribution of Javanese ethnic in Suriname in 1991-2015? (4) How was the impact of the political role of Javanese ethnic in Suriname in 1991- 2015? (3). That four questions become the basic and the main problem in this research. This research uses the historical method includes the four steps in it, such as heuristic, critic, interpretations and historiography. Meanwhile, the data collection techniques that used in this research is literature studies, by examining the sources that relevant with the problems in this research. The approach in this research using interdisciplinary approaches by using the concept of politics, anthropology and sociology. The politics concepts that used is political party and government. The concept used from anthropology is ethnic, and the concepts from sociology is social mobility and adaptation theory. The main content of this research is the role of Javanese ethnic as newcomers in politics in Suriname. This research explains that the existence of discrimination policy by the Suriname’s special autonomy government against Javanese Ethnic who were reputed as the newcomers that made them joined politics in Suriname by establishing Javanese parties, entering the government and parliament, so that giving the impact for the Javanese ethnic on the modern era, there are many important political figures in Suriname who served as the head of parliament, prime minister and the candidate of Suriname’s president.

Keywords : Suriname, Javanese Ethnic, Political Parties

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Peranan etnis Jawa politik di Suriname (1991- 2015), masalah utama yang diangkat dalam skripsi ini adalah “Bagaimana peranan etnis Jawa dalam politik di Suriname tahun 1991- 2015?”. Masalah utama tersebut kemudian dibagi menjadi empat pertanyaan, yaitu: (1) Mengapa etnis Jawa tertarik politik di Suriname? (2) Bagaimana perkembangan politik di Suriname pada tahun 1991- 2015? (3) Bagaimana kontribusi etnis Jawa terhadap politik di Suriname tahun 1991-2015? (4) Bagaimana dampak dari peranan etnis Jawa terhadap politik Suriname pada tahun 1991- 2015? (3). Keempat pertanyaan menjadi landasan utama penelitian dan pokok permasalahan dalam penelitian. Metode yang yang digunakan adalah metode historis dengan melakukan empat langkah penelitian sejarah, yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi dan historiografi. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan teknik studi literatur yakni mengkaji sumber-sumber literatur yang relevan dengan permasalahan yang dikaji penulis. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan interdisipliner dengan menggunakan konsep ilmu politik, antropologi dan sosiologi. Konsep dari ilmu politik yang digunakan adalah partai politik dan pemerintahan. Konsep yang diambil dari antropologi yaitu etnis sedangkan konsep yang diambil dari sosiologi yaitu mobilitas sosial dan teori adaptasi. Pokok dari konten penelitian ini adalah peranan etnis Jawa sebagai etnis pendatang dalam politik di Suriname. Inti dalam skripsi ini menjelaskan bahwa adanya kebijakan diskriminasi oleh pemerintahan otonomi khusus Suriname terhadap etnis Jawa yang dipandang sebagai etnis pendatang membuat sebagian etnis Jawa yang menetap masuk politik di Suriname, dengan mendirikan partai- partai berbasis Jawa, masuk pemerintahan dan parlemen sehingga berdampak pada etnis Jawa pada era modern, banyak tokoh-tokoh penting di politik Suriname yang menjabat sebagai Ketua Parlemen, Menteri dan calon Presiden Suriname.

Kata kunci: Suriname, Etnis Jawa, Politik, Partai Politik

Author correspondence

Email: aceprachmat@gmail.com

Available online at <http://http://ejournal.upi.edu/index.php/factum>

PENDAHULUAN

Suriname merupakan salah satu negara di Benua Amerika Selatan (Latin) tepatnya didaratan Guyana. Negara ini berbatasan dengan Guiana Perancis di timur dan Guyana di barat, di selatan berbatasan dengan Brasil dan di utara berbatasan dengan Samudera Atlantik. Suriname memiliki luas wilayah yang cukup besar, dengan wilayah sekitar 160.000 KM² yang di kelilingi oleh sungai- sungai dan gunung di bagian selatan, penduduk Suriname berasal dari berbagai etnis, baik etnis pribumi maupun etnis pendatang. Etnis pribumi didominasi oleh etnis Creol, dan beberapa etnis lainnya yakni Maroon, Bush Negro, sedangkan etnis pendatang yaitu Hindustan, Jawa dan Tionghoa. Hal menarik dimiliki oleh Suriname, jika dibandingkan dengan negara- negara di Amerika Latin lainnya yaitu terdapatnya etnis Jawa yang menetap di negara tersebut. Etnis Jawa merupakan salah satu etnis yang berada di Indonesia, jarak antara Suriname dengan Indonesia yang sangat jauh tidak menjadi alasan bagi etnis Jawa untuk berada di negara tersebut. Populasi etnis Jawa yang cukup besar membuat etnis ini di Suriname seakan berada daerah asalnya yaitu pulau Jawa, sehingga etnis Jawa di Suriname terbentuk menjadi kelompok baru. Pada abad ke 20 perkembangan politik di berbagai wilayah di dunia mengalami perubahan, baik di Eropa, Asia, Afrika bahkan di Amerika, khususnya di kawasan Amerika Selatan atau Amerika Latin. Salah satu dari dampak pengaruh perkembangan politik di kawasan Amerika Latin yaitu lahirnya beberapa negara baru di kawasan ini, diantaranya Guyana, Guiana Prancis, dan Suriname. Hal tersebut dikarenakan

kawasan ini merupakan wilayah yang dikuasai sejak kolonialisme bangsa Eropa sampai pasca perang dunia kedua, dimana negara- negara tersebut mendapatkan kemerdekaannya. Khususnya di Suriname, negara yang memperoleh kemerdekaan pada tahun 25 November 1975 oleh Belanda membawa Suriname menjadi negara yang berdaulat, kondisi tersebut akan berdampak pada sistem tatanan negara Suriname, termasuk dalam politik.

Berbicara perpolitikan di Suriname yang terdiri dari berbagai etnis, perubahan status Suriname sebagai negara akan berpengaruh terhadap pola perpolitikan di negara tersebut, salah satunya di dalam kepartaian. Di Suriname banyak berdiri partai- partai yang cenderung berlatarbelakang etnis dan tidak jarang penamaan partai menggunakan bahasa- bahasa etnis yang menetap di Suriname, sehingga persaingan antar etnis dalam politik di Suriname cukup tinggi. Keberadaan beberapa etnis di negara Suriname baik pendatang maupun pribumi menjadikan negara yang multietnis dalam berbagai aspek kehidupan, khususnya dalam perpolitikan yang cukup beragam, termasuk etnis Jawa yang turut memanfaatkan kondisi tersebut, untuk berpartisipasi dalam politik di Suriname. Populasi etnis pribumi yang mendominasi menjadi sebuah tantangan bagi etnis- etnis lainnya, meskipun persaingan etnis dalam politik cukup tinggi di Suriname dan stabilitas politik dalam negeri yang berubah cepat karena adanya kudeta, namun etnis Jawa mampu bertahan, pada masa era modern, muncul beberapa tokoh- tokoh keturunan Jawa yang berhasil menempatkan posisinya di kabinet dan parlemen di Suriname, selain itu salah satu hal yang menarik dari etnis Jawa di

Suriname yaitu adanya calon presiden berasal dari etnis Jawa. Jauh dari induknya di pulau Jawa tidak membuat etnis Jawa di sana punah, etnis Jawa mampu bertahan dan berkembang, Kemiripan kebudayaan yang dimiliki negara Suriname ini menjadi suatu hal yang unik dan bisa disebut sebagai saudara jauh di Amerika Latin.

Dari pemaparan diatas memunculkan ketertarikan penulis untuk menulis dinamika masyarakat etnis Jawa di Suriname tersebut. Kurun waktu yang dipilih oleh penulis dalam kajian ini adalah tahun 1991- 2015 karena periode tersebut merupakan periode awal demokrasi di Suriname pasca kudeta militer, sebelum tahun 1991 terjadi beberapa kali kudeta pemerintahan oleh militer. Ditandai dengan adanya Pemilu 1991 setelah mundurnya pemerintahan militer dan periode tersebut merupakan masa perkembangan etnis Jawa dalam politik yang cukup pesat, terbukti pada Pemilu 2015 salah satu calon Presiden berasal dari etnis Jawa. Eksistensi etnis Jawa di Suriname dan keunikan yang di milikinya ini oleh penulis berusaha tuangkan melalui penelitian skripsi yang berjudul Peranan Etnis Jawa dalam Politik di Suriname (1991- 2015). Guna mengetahui dan mengemukakan bagaimana perkembangan masyarakat etnis Jawa di Suriname khususnya dalam ranah politik.

METODE PENELITIAN

Metode dalam suatu penelitian dapat dikatakan sebagai “ruh”, sehingga tidak mungkin suatu penelitian jika tidak menggunakan suatu metode. metode yang digunakan penulis adalah metode historis, menurut Gottschalk (1986, hlm. 32), metode historis merupakan suatu proses

menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau. Oleh karena itu skripsi ini merupakan sebuah penelitian yang mendeskripsikan dan menganalisis masa lampau, mengingat judul dari skripsi ini adalah Peranan Etnis Jawa dalam Politik di Suriname (1991-2015). Penelitian ini ditekankan kepada kajian sumber sekunder yakni terhadap buku- buku, artikel atau karya ilmiah yang terkait dengan topik penelitian. Dengan demikian, diperlukan sebuah metode historis untuk menuntun kepada penulisan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Langkah-langkah penelitian yang digunakan penulis, sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Ismaun (2005, hlm. 48-50), menurutnya langkah-langkah penelitian sejarah adalah Heuristik, Kritik Sumber, Interpretasi, dan Historiografi.

1) Heuristik

Pada tahap ini penulis melakukan kegiatan pencarian dan pengumpulan berbagai sumber sejarah, sumber- sumber disini seperti yang dikatakan Sjamsuddin (2007, hlm. 95) adalah “segala sesuatu yang langsung atau tidak langsung menceritakan kepada kita tentang suatu kenyataan atau kegiatan manusia pada masa lalu (past actuality)”. Sumber sendiri dapat diklasifikasikan menjadi tiga macam, yaitu sumber tulisan, sumber lisan dan sumber visual. Untuk itu, pada pelaksanaan tahapan ini, peneliti mengunjungi beberapa perpustakaan, diantaranya Perpustakaan UPI, Perpustakaan Batoe Api, Perpustakaan FIB dan FISIP UNPAD, Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PNR), Perpustakaan UI, Perpustakaan Central Strategic Internasional Studies (CSIS) dan internet.

Berdasarkan pencarian tersebut, penulis berhasil mengumpulkan beberapa sumber utama, baik berupa buku, jurnal, skripsi, thesis dan surat kabar, seperti: buku Suriname yang saya lihat, *The Constitution of The Republic of Suriname (Bulletin of Acts and Decrees 1987 NO. 166).*, *Country Studies Series: Suriname.*, *The Javanese in Suriname (ethnicity in an ethnically plural Society).*, *Bahasa Jawa di Suriname: bahasa pengantar di radio garuda*, dst. untuk jurnal diantaranya: *Ethnicity and politics: political adaption of Hindustanis in Suriname.*, *Political Party and Campaign Financing in Suriname.*, *Democracy and Governance in Multi-Ethnic Societies: The case of Suriname.*, *2015 Elections in Suriname: a historical power shift.* Sedangkan untuk Skripsi dan thesis yaitu: *Budaya Jawa dalam Diaspora: Tinjauan pada Masyarakat Jawa di Suriname.*, *Berbagai Bentuk Kerjasama Kebudayaan Indonesia- Suriname dalam Diplomasi Kebudayaan 2007- 2010.*, *Suriname an Asian Immigrant and the Organic Creation of the Caribbean's Most Unique Fusion Culture.*, dsb.

2) Kritik Sumber

Pada tahapan ini, peneliti melakukan verifikasi untuk menguji validitas sumber-sumber yang telah diperoleh sebagai upaya penulisan sejarah berkaitan dengan Peranan etnis Jawa dalam politik di Suriname. Tidak semua sumber yang telah diperoleh dari hasil penelusuran relevan digunakan sebagai sumber dalam penelitian ini, baik itu dilihat dari segi otentikitas keaslian sumber ataupun isi dari sumber tersebut. Kritik dilakukan pada dua bagian, yaitu internal dan eksternal. Pada bagian internal dilakukan pengujian terhadap isi sumber, untuk menguji

kredibilitas isi dan menjadi fakta atau yang sudah dianggap kebenarannya, sedangkan eksternal, melakukan identifikasi penulis tersebut, untuk menjamin kredibilitas dari konten sumber.

3) Interpretasi

Setelah melakukan tahapan kritik sumber, tahapan dalam penelitian selanjutnya adalah interpretasi. Dimana, tahapan ini berkaitan dengan kemampuan penulis untuk menganalisis informasi yang berhasil didapatkan untuk kemudian disintesis agar menghasilkan suatu interpretasi yang menyeluruh (Kuntowijoyo, 1995, hlm. 73). Sumber-sumber yang telah diperoleh dihubungkan antara fakta satu sama lain untuk mengetahui sejarah yang berkaitan dengan topik kajian penelitian ini. Untuk selanjutnya dapat direkonstruksi menjadi sebuah tulisan sejarah.

4) Historiografi

Tahapan terakhir yang dilakukan peneliti dalam metode penelitian sejarah adalah melaporkan hasil penelitian atau historiografi. Seperti yang diungkapkan oleh Sjamsuddin bahwa historiografi ini merupakan langkah akhir dari keseluruhan prosedur penulisan karya ilmiah sejarah yang merupakan kegiatan intelektual dan cara utama dalam memahami sejarah (2007, hlm. 156). Penulisan skripsi ini menggunakan sistem penulisan yang mengacu pada pedoman penulisan karya tulis ilmiah Universitas Pendidikan Indonesia yang diterbitkan tahun 2015. Hasil penelitian ini kemudian menghasilkan sebuah karya ilmiah yang berjudul *Peranan Etnis Jawa dalam Politik di Suriname (1991-2015)*.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Masuknya Etnis Jawa dalam Politik di Suriname

Suriname merupakan salah satu negara yang berada didaratan Guyana Amerika Latin, beberapa negara Eropa berhasil menguasai negara- negara di wilayah tersebut, salah satunya negara yang berhasil bercokol di wilayah Suriname yaitu negara Belanda yang sudah cukup lama menguasai kawasan tersebut, yang berakhir pada pemberian otonomi dan berujung pada kemerdekaan bagi Suriname sendiri. Menurut Choenni (2014, hlm. 408). Bahwa *“Before 1948, Suriname got autonomy, but the colonial rule ended only in 1954 when Suriname became an independent part of the Kingdom of The Netherlands”*. Adanya otonomi bagi Suriname menjadi suatu peluang bagi Suriname menjadi negara yang merdeka, sebelum tahun 1948 Suriname resmi menjadi negara yang memiliki pemerintahan otonomi khusus dari Belanda, terdapat beberapa alasan yang melatarbelakangi pemberian otonomi khusus ini salah satunya karena faktor politik, perubahan haluan politik kerajaan Belanda, yang semula hanya tampak remang-remang, tetapi setelah berakhirnya perang dunia II menjadi jelas, ketetapan bahwa semua jajahan Belanda akan memperoleh kemerdekaan, meskipun dengan batas- batas tertentu (Hardjo, 1989, hlm. 19). Selain itu dampak lainnya di sebabkan oleh merdekanya Indonesia dari Belanda, kondisi tersebut berpengaruh terhadap Suriname yang pada dasarnya negara yang sama sedang dijajah oleh Belanda, pada masa pemerintahan otonomi khusus dari Belanda, pemangku kebijakan di dalam tubuh pemerintahan

kebanyakan didominasi oleh etnis *Creol* atau etnis Pribumi. Dominasi dalam badan pemerintahan tersebut menimbulkan suatu persaingan dari beberapa etnis lainnya, menurut Komariah (2011, hlm. 35) bahwa “sangat disayangkan akibat persaingan etnis itu, banyak posisi jabatan dalam pemerintahan otonomi di Suriname, didominasi oleh orang orang *Creol*”. Kondisi ini membuat kebijakan yang bersifat diskriminatif, adapun diskriminasi yang sangat menonjol saat itu yaitu pada politik, banyak kebijakan- kebijakan yang sangat merugikan etnis minoritas dan etnis pendatang, salah satunya etnis Jawa. Pada struktur masyarakat di negara Suriname, sebagian besar etnis Jawa tergolong pada etnis yang berada di lapisan rendah, hal tersebut di karenakan sedikitnya etnis Jawa yang berhasil menempatkan posisinya di beberapa profesi yang tinggi, etnis Jawa hanya mampu berada pada lapisan bawah. Hanya sedikit darinya yang berhasil dengan menempatkan pada profesi yang lebih baik, menurut Ismael, (1995, hlm 62-63). Adapun diskriminasi yang dilakukan oleh pemerintahan Suriname saat itu yaitu:

- a. Upah- upah pekerja dari Indonesia lebih rendah dari upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah
- b. Tidak dianjurkannya pendidikan bagi orang- orang Jawa, hanya orang- orang India saja diperbolehkan karena diawasi Inggris
- c. Adanya diskriminasi lapangan pekerjaan terhadap pegawai- pegawai orang Indonesia yang bekerja di dalam perusahaan pemerintahan Suriname.

Beberapa bentuk diskriminasi yang dilakukan oleh pemerintahan yang didominasi oleh etnis pribumi tersebut

membuat kebijakan yang tidak memihak etnis pendatang khususnya Jawa, berbeda dengan etnis India di Suriname mendapat suatu pengawasan dari negara jajahan yaitu Inggris yang masih mengawasi pekerja India yang menetap di Suriname, sehingga membuat etnis India mendapatkan suatu keamanan dan perlindungan dari adanya diskriminasi politik saat itu. Diskriminasi terhadap etnis Jawa sudah terjadi sejak penjajahan Belanda di Suriname, kondisi tersebut semakin parah pada masa pemerintahan otonomi khusus Suriname. Banyak etnis Jawa memilih kembali ke Indonesia, namun tidak sedikit yang memilih untuk menetap, adanya perbedaan pandangan akan kondisi di Suriname tersebut karena berbedanya lapisan (menengah dan bawah) dari etnis Jawa sendiri. Munculnya kesadaran akan kondisi etnisnya berada pada lapisan bawah membuat sebagian etnis Jawa yang tidak memilih untuk kembali ke tanah air, berusaha menempatkan etnisnya pada posisi yang setara dengan etnis lainnya, dengan berbagai cara, salah satunya dengan meningkatkan kualitas pendidikan orang-orang Jawa, menurut Dwipusrandito (1984, hlm. 12). Bahwa “mereka menganjurkan supaya anak-anak mereka disekolahkan ke sekolah yang lebih tinggi agar dengan pendidikan, nasib orang Jawa setapak demi setapak bisa lebih maju”.

Adanya kesadaran akan pendidikan ini menjadi awal adanya kesadaran untuk bertahan dan bersaing dengan etnis lainnya yang menetap di Suriname, seiring perkembangan kesadaran akan pendidikan melahirkan golongan intelektual dan hal tersebut menyebar ke berbagai aspek kehidupan di Suriname, salah satunya kesadaran berpolitik

keadaan mulai berubah, sejak saat itu timbul golongan orang-orang Indonesia yang sadar pentingnya berpolitik, sadar akan keadaan yang tidak memuaskan dari pada orang-orang senegerinya di dalam masyarakat Suriname, mulailah membentuk organisasi-organisasi yang mempunyai tujuan politik (Ismael, 1995, hlm. 240). Pada mulanya sebagian etnis Jawa yang berasal dari kalangan intelektual membuat lembaga atau organisasi-organisasi yang memiliki tujuan politik, hal tersebut dikarenakan kondisi politik dengan kebijakannya yang tidak memihak kaum etnis Jawa merasa perlu membuat badan atau lembaga untuk melindungi hak dan kewajiban etnis Jawa yang menetap di Suriname, dengan adanya organisasi tersebut menjadi suatu wadah untuk menyampaikan aspirasinya yang selama ini dipandang sebelah mata oleh penguasa di pemerintahan. Pada tahun 1947 telah didirikan dua organisasi yaitu KTPI (Kaum Tani Persatuan Indonesia) yang dipimpin oleh Soeminta dan PBIS (Pergerakan Bangsa Indonesia Suriname), yang dipimpin oleh Soediono Soeriwisastro (Hardjo, 1989, hlm.19), terdapat dua organisasi besar yang lahir di Suriname yang berlatar belakang dari etnis Jawa yaitu KTPI dan PBIS, kedua organisasi tersebut memiliki suatu tujuan yaitu untuk meningkatkan kehidupan etnis Jawa di Suriname dari segala diskriminasi politik yang ada, meskipun lembaga tersebut berbentuk organisasi akan tetapi memiliki tujuan politik, sehingga organisasi-organisasi tersebut merupakan organisasi semi politik. Menurut Suparlan (1995, hlm. 226) bahwa *Their activity in the party stimulated growing feelings of self-confidence among another Javanese, which in turn gave rise to the notion that*

they could organize political groups and participate in the national politics of Suriname. Setelah membentuk organisasi tersebut kepercayaan diri lahir dikalangan masyarakat Jawa dan merasa mampu turut serta dalam politik di Suriname. Seiring perkembangan organisasi-organisasi tersebut berubah secara sistem dan badan, dimana organisasi tersebut berubah menjadi suatu partai politik yang berasal dari etnis Jawa dan menjadi wakil di parlemen negara Suriname. Munculnya partai politik dari etnis Jawa tersebut menjadi titik awal partisipasi masyarakat Jawa pada politik di Suriname.

Perkembangan Politik di Suriname

Adanya status otonomi khusus bagi Suriname dari Kerajaan Belanda merupakan masa transisi Suriname menuju kemerdekaan, pada masa ini Suriname memiliki kabinet yang terdiri dari wakil-wakil partai politik. Beberapa tahun kemudian Suriname mendapatkan kemerdekaan dari Belanda, menurut Komariah (2013, hlm. 53) bahwa “Republik Suriname (*Surinam*) memperoleh kemerdekaan dari Belanda pada tanggal 25 November 1975”. Suriname resmi menjadi sebuah negara yang berdaulat, secara politik Suriname mampu menjadi negara yang mandiri baik hubungan politik di dalam negerinya maupun hubungan politik luar negeri, akan tetapi perekonomian Suriname masih bergantung pada Belanda karena kondisi Suriname yang baru merdeka. Belanda memiliki pengaruh politik dan ekonomi yang besar terhadap pembangunan Suriname pasca merdeka dengan memberikan dana bantuan keuangan dan kerjasama politik (Kusumo, 2011, hlm. 55-56). Lima tahun setelah merdeka, Suriname diguncang oleh kudeta militer, penyebab utama dari adanya kudeta tersebut dikarenakan adanya perbedaan pandangan

dalam mengendalikan negara, menurut Darmoko (2016, hlm. 13) “Perselisihan atau pertikaian antar suku bangsa pernah terjadi di Suriname, pada tanggal 25 Februari 1980 terjadi kudeta militer dipimpin oleh Desi Bouterse menembak mati tokoh-tokoh oposisi yang sebagian besar keturunan Hindustan”. Kendali pemerintahan dikuasai oleh militer yaitu Desi Bouterse, pada masa pemerintahannya terjadi kekacauan karena adanya konflik sipil dan ketidakstabilan negara yang dipicu oleh adanya demonstrasi yang berujung tewasnya 15 tokoh demonstran oleh pihak militer, insiden tersebut berdampak pada pemberhentian bantuan oleh Belanda (Kusumo, 2011, hlm. 54). Kondisi politik Suriname yang tidak stabil, mendesak untuk diadakannya suatu referendum, menurut Shute (1995, hlm. 87) bahwa “*A new constitution was drawn up and approved in a referendum in september 1987*”. Adanya referendum ini bertujuan untuk menstabilkan kondisi negara, salah satunya dengan mengadakan Pemilu pada tahun 1987.

Pada Pemilu tahun tersebut diikuti oleh tiga poros termasuk militer yang tergabung pada poros NDP (*Nationale Democratie Parlementer*) yang dipimpin oleh Bouterse, sedangkan poros lainnya yaitu poros Front yang tergabung dari multipartai besar (NPS, VHP, KTPI) yang berasal dari sipil, dan poros terakhir yaitu poros partai-partai kecil dari etnis minoritas lainnya. menurut Menke (2001, hlm. 74) bahwa “Hasil dari Pemilu tahun 1987 dimenangkan oleh koalisi partai tradisional (Front) yang terdiri dari NPS, VHP, KTPI, total suara 87.1%, sedangkan NDP 9.3% dan koalisi partai lainnya 3.7%”. Hasil dari Pemilu tersebut menunjukkan pada pemerintahan kembali ke sipil. Pada tahun 1987 dibentuk suatu undang-undang

baru yang dinamakan Konstitusi Suriname 1987 dan menjadi acuan UU Pemilihan Umum Nasional (Pemilu) Legislatif dan Presidensial, dalam Konstitusi tersebut, Suriname menyelenggarakan Pemilu setiap 5 (lima) tahun sekali, kecuali dalam keadaan darurat (emergensi). pemilihan langsung diselenggarakan hanya untuk memilih Legislatif saja, menurut menurut Pool (2000, hlm. 30-54) bahwa:

“Pemilihan anggota legislatif berupa pemilihan anggota National Assembly / NA (DPR), anggota Local Councils / LC (DPD) dan District Councils / DC (DPRD). Pemilihan legislatif di tingkat NA (DPR) dengan sistem proportional representative dan di tingkat LC dengan sistem individual plurality voting. Sedangkan pemilihan anggota DC diselenggarakan dengan sistem constituensi secara tidak langsung, yaitu setelah atau berdasarkan hasil Pemilu di tingkat LC”.

Setiap parpol diharuskan untuk mempunyai anggota pendukung minimal 1 % dari seluruh jumlah calon pemilih terdaftar dari seluruh penduduk Suriname. partai politik yang turut dalam Pemilu dapat maju ke Pemilu secara sendirian atau dengan berkoalisi, Pemilu anggota NA (DPR) dan LC (DPD) diselenggarakan secara serentak di 10 district (provinsi). Terdapat perubahan dari jumlah kursi yang ditetapkan pada konstitusi Suriname 1987 yaitu berjumlah 51 kursi untuk tingkat NA (DPR) tersedia 51 kursi sebagai perwakilan di Parlemen, menurut KBRI (2015) bahwa: 51 kursi tersebar di 10 wilayah pemilihan dengan pembagian kursi berdasarkan tingkat jumlah penduduk, yang susunannya sebagai berikut : 1. Paramaribo : 17 kursi, 2. Wanica : 7 kursi, 3. Nickerie : 5 kursi, 4. Commewijne : 4 kursi, 5. Sipaliwini : 4 kursi, 6. Brokopondo : 3 kursi, 7. Marowijne : 3 kursi, 8. Para : 3 kursi. 9. Saramaca : 3 kursi, 10. Caronie : 2 kursi. Perbedaan jumlah kursi di sesuaikan dengan populasi yang tinggal di daerah tertentu, menurut Luk & Ahmadali (2015, hlm. *“The Local Councils represent*

the electorate in the local legislative process. The number of ressorts in each (Electoral) District is determined in the Decree Division Ressorts, there are currently 62 ressorts. As with the District Council, the number of seats allocated for each Local Council is determined by the population of the respective ressort”. Jumlah kursi dialokasikan untuk masing-masing Dewan Daerah ditentukan oleh populasi ressort masing-masing. Hingga saat ini Suriname memiliki 10 Provinsi dengan 62 Kabupaten/ Kota.

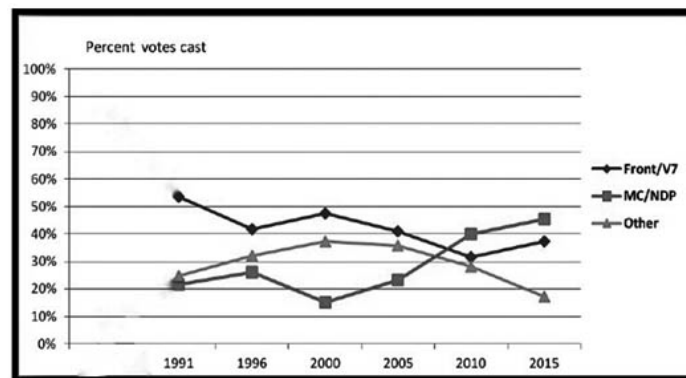
Setelah pelaksanaan pemilihan *District Councils* dan pembentukan susunan dan pengangkatan Ketua DPR, proses Pemilu dilanjutkan dengan pemilihan pasangan Presiden dan Wakil Presiden (Wapres) di DPR. Apabila dalam pemilihan National Assembly (DPR) berhasil memenangkan lebih dari 2/3 suara maka pemilihan Presiden dapat langsung terpilih dari partai atau koalisi tersebut, akan tetapi jika ketentuan tersebut tidak terpeenuhi maka pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan berdasarkan voting di Majelis Perwakilan Parlemen yang diikuti secara keseluruhan di Parlemen (NA, LC, DC). Menurut Pool dalam Konstitusi Suriname 1987 (2000). Bahwa:”Ketentuan parpol atau kelompok atau fraksi yang memiliki minimal tujuh kursi atau anggota di DPR atau parlemen berhak mengajukan pasangan calon Presiden dan Wapres dari kelompok masing-masing untuk ikut dalam pemilihan di parlemen, dari jumlah pasangan yang ikut pemilihan (maksimal 3 pasang), parlemen menetapkan Presiden dan Wapres terpilih dari pasangan yang berhasil memperoleh dukungan minimal 34 dari 51 total anggota (2/3 mayoritas)”. Apabila berpedoman pada aturan Undang-undang tersebut maka pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Suriname dipilih

secara tidak langsung dan dipilih oleh Parlemen dengan ketentuan memenuhi syarat minimal 2/3 suara di Parlemen.

Undang- undang tersebut mulai di Pemilu- Pemilu berikutnya, tiga tahun kemudian Suriname kembali terjadi kudeta pemerintahan oleh militer, menurut Singh (2007, hlm. 87) “Clearly outmaneuvered, Bouterse and his associates sulked, but not for long, on December 24, 1990, the military removed the elected government”. Kudeta kembali terjadi, yang disebabkan oleh perbedaan pandangan, namun kudeta kali ini tidak bertahan lama karena seperti kudeta sebelumnya, yang membawa Suriname menjadi terpuruk.

Selain itu karena ada faktor eksternal yaitu adanya desakan dari negara- negara pendorong Suriname, menurut Singh (2014, hlm. 136). “*Condemned by the foreign government and the OAS and, under threat of foreign intervention by the US and the Netherlands, Bouterse and his associates allowed new elections on May 25, 1991*”. Adanya desakan oleh lembaga OAS dari Amerika dan negara Belanda, salah satu tugas pemerintahan di bawah militer tersebut untuk mempersiapkan Pemilu pada 25 Mei 1991, sama halnya dengan Pemilu sebelumnya, Pemilu diikuti oleh tiga poros, seperti Pemilu sebelumnya, menurut Menke (2015, hlm. 665):

Gambar 4.1 Perkembangan hasil Pemilu 1991- 2015
Percentage of votes cast nation- wide by political organizations, 1991- 2015



Sumber:

Menke(2000a).*CentraalHoofdstembureau(2005,2010)*.<http://www.dna.sr/verkiezingen/uitslag-verkiezingen-2015/>

Pasca kudeta pemerintahan yang kedua, Pemilu Suriname pada tahun 1991 sampai 2015 merupakan Pemilu yang demokratis dan tidak kembali terjadi kudeta pemerintahan. Adapun hasil dari Pemilu tahun 1991- 2015 yang diselenggarakan setiap lima tahun sekali, koalisi partai tergabung dalam tiga poros utama, yaitu Front, NDP/ Millennium

Combination (MC) dan poros partai-partai kecil. Perolehan suara dari Pemilu-Pemilu diatas terjadi perubahan yang cukup signifikan. Pada Pemilu tahun 1991 dimenangkan oleh koalisi Front akan tetapi secara kuantitas perolehan suara poros tersebut mengalami penurunan dari Pemilu sebelumnya. Pada tahun 1991 terbentuk pemerintah sipil yang

baru, pemerintahan Suriname bersistem parlementer demokrasi perwakilan, dalam Parlemen Nationale Assemble (DPR), terdapat 51 anggota dari enam fraksi, Presidennya adalah Drs. R.R. Venetiaan dan Wakil Presiden Jules Ajodhia (Djalil, 1995, hlm. 50). Pemerintahan Venetiaan memiliki struktur yang beragam dan multietnis dalam kabinetnya yang bertujuan untuk mewedahi setiap etnis yang berada di Suriname sehingga kudeta tidak terjadi kembali karena adanya dukungan disetiap etnis. Perolehan Suara kembali berubah pada Pemilu 1996, Front kembali mengalami penurunan sedangkan partai tradisional dan NDP mengalami

kenaikan dan membentuk poros baru yang berdampak pada kemenangan Pemilu tahun 1996, menurut Choenni (2014, hlm.424) “The Creole J. Wijdenbosch became President and a Hindostani, P. Radhakishun was appointed Vice-President. Posisi Presiden dipegang oleh Jules Wijdenbosch dan wakil Presiden oleh Radhakishun. Kemenangan NDP dan partai tradisional tidak berlanjut pada Pemilu tahun 2000, koalisi tersebut mengantarkan kembali R.R. Venetiaan (NPS) ke tampuk kursi kepresidenan 2000 – 2005, Sebagai Wakil Presiden, terpilih Jules Rattankoemar, lebih jelasnya, menurut Menke (2015, hlm. 667) :

Tabel 4.5 Perolehan Suara pada Pemilu 1991- 2015

Year	New Front	Millenium Combination	Other Parties	Total
1991	54.2%	21.9%	24%	100%
1996	41.7%	26.2%	32.1%	100%
2000	47.5%	15.1%	37.4%	100%
2005	39.4%	22.2%	38.4%	100%
2010	32%	40%	28%	100%
2015	37.5%	45%	17.5%	100%

Sumber: Jake Menke (2015, hlm. 667)

Kemenangan Front berlanjut pada Pemilu tahun 2005, meskipun mengalami penurunan suara, Venetiaan melakukan koalisi dengan partai-partai kecil tradisional, sehingga posisi Presiden kembali dikendalikan oleh Venetiaan dari Front. Namun pada Pemilu tahun 2010 terjadi perubahan, NDP berhasil memenangkan Pemilu, namun sesuai dengan Konstitusi Suriname 1987, untuk memenangkan pemilihan Presiden harus memenuhi 2/3 kursi di Parlemen 34 dari 51 kursi, koalisi NDP membutuhkan sedikit dorongan dari jumlah kursi yang

sudah di peroleh, menurut Griffith (2011, hlm. 9) “*Since no political party won decisively, coalition-building became necessary. After two months of political negotiations, on July 19, 2010 Desi Bouterse emerged as head of the Mega Combination slate and the Ninth President of the Republic, having fashioned a multi-ethnic coalition that delivered 36 votes*”. Bouterse membentuk koalisi baru dengan partai lain, dan membentuk koalisi baru yang dinamakan Mega Combination, sehingga perolehan kursi di Parlemen koalisi tersebut berhasil menghasilkan 36

kursi di Parlemen. Kemenangan NDP/ MC menjadikan Bouterse sebagai pemimpin koalisi sebagai Presiden Suriname tahun 2010- 2015, dalam kepemimpinannya Suriname berhasil menjadi negara yang cukup stabil dan salah satunya berdampak pada Pemilu 2015, NDP beserta koalisinya MC kembali memperoleh suara terbanyak, menurut Coleman (2017, hlm. 20). "On May 25, 2015, Surinamese voters went to the polls to cast their votes. Once the ballots were counted, it was announced that Bouterse and his NDP had secured a narrow victory winning 26 of the 51 seats in parliament". Pada tanggal 25 Mei 2015, NDP berhasil memperoleh 26 kursi ditambah oleh koalisi partai- partai kecil lainnya di DPR. Kemenangan koalisi MC kembali terpilihnya Bouterse sebagai Presiden Suriname periode 2015- 2020.

Kontribusi Etnis Jawa pada Politik di Suriname.

Adanya partisipasi etnis Jawa dalam perpolitikan turut memberikan kontribusi terhadap tatanan politik di Suriname, etnis Jawa mulai mendirikan partai- partai yang beranggotakan etnis Jawa dalam Pemilu- Pemilu di Suriname. Partai PBIS dan KTPI dipandang sebagai pelopor lahirnya partai- partai etnis Jawa di Suriname, seperti partai Pandawalima dan Pertjajah Luhur. Setelah dibentuknya partai- partai, etnis Jawa mencoba masuk dalam beberapa kabinet pemerintahan khususnya pada pemerintahan tahun 1991 sampai 2015, etnis Jawa berhasil masuk dalam susunan kabinet pemerintahan yang berkuasa, karena etnis Jawa menjadi bagian dari koalisi partai- partai yang bersaing dalam Pemilu. Dalam setiap kabinet Pemerintahan, menurut Nay (2010 , hlm. 5) "*a 15 member State Advisory Council advises (Minister) the*

president in the conduct of policy". Setiap pemerintahan yang menjabat di Suriname sedikitnya dibantu oleh 15 kementerian yang bertujuan untuk melaksanakan kebijakan pemerintahan, termasuk etnis Jawa yang berhasil memperoleh beberapa kursi menteri. Kebijakan- kebijakan pemerintahan ditujukan untuk semua etnis di Suriname, setelah adanya etnis Jawa masuk dalam pemerintahan, terdapat kebijakan yang dikhususkan untuk etnis Jawa yaitu dibentuknya lembaga- lembaga yang bertujuan untuk melestarikan kebudayaan Jawa di Suriname, menurut Komariah (2013, hlm. 54) "untuk mempertahankan dan melestarikan bahasa Jawa di Suriname, pemerintah Suriname dan Indonesia dilakukan kerja sama dengan membentuk organisasi atau lembaga seperti Suriname- Indonesia Friendship Association (SIFA), Sticing voor de Javaanse taal in Suriname (JATAS), dan Vereniging Herdenking Javaanse Immigratie (VHJI). Organisasi atau lembaga tersebut ditujukan khusus untuk etnis Jawa, selain itu adanya etnis Jawa turut berperan bagi Suriname dalam keanggotaan organisasi internasional, menurut Mell (2015, hlm. 114) "*In 1997, Suriname was accepted as a member of the Organization of the Islamic Conference (in 2008 renamed Organization of Islamic Cooperation) and from the late 1990s the Islamic Development Bank has channeled funds to Suriname*". Suriname masuk keanggotaan organisasi kerjasama negara- negara Islam (OKI), karena Suriname memiliki populasi muslim yang cukup besar di kawasan Amerika Latin, kebanyakan berasal dari etnis Jawa dan Hindustan, maka Suriname termasuk kedalam organisasi internasional tersebut.

Kontribusi lainnya etnis Jawa di pemerintahan yaitu hubungan Suriname dengan Indonesia semakin baik. Terbukti Suriname mulai mendirikan Kedutaan Besarnya di Jakarta pada bulan April 2002 dan pada tanggal 02 Agustus 2002 Dubes Sahidi Rassam dilantik oleh Presiden Venetiaan menjadi Duta Besar LBBP Suriname pertama di Indonesia (Kusumo, 2011, hlm. 61). Adanya peranan etnis Jawa menjadikan Indonesia dengan Suriname menjalin kerjasama diberbagai bidang.

Dampak Peranan Etnis Jawa terhadap Politik di Suriname

Keberadaan etnis Jawa akan berdampak terhadap kehidupan di Suriname seperti dalam politik, beberapa tokoh politik yang cukup berpengaruh di Suriname berasal dari keturunan Jawa dan berhasil menempatkan posisinya di kementerian, menurut Komariah (2011, hlm. 40) “sejak Suriname merdeka terdapat tokoh- tokoh keturunan etnis Jawa berhasil menjadi menteri, terhitung sekitar 30 orang”. Tokoh- tokoh tersebut diantaranya:

1. Willy Soemita (Menteri Sosial 1991-1996)
2. Sonny Wagirin Kertoidjojo (Menteri dalam Negeri 1996- 2000)
3. Soewato Moestadja (Menteri Sosial 1996- 2000, Menteri Dalam Negeri 2010- 2015)
4. Saimin Redjosentono (Menteri Pertanian, Peternakan, dan Perikanan 1996-2000)
5. Paul Salam Somohardjo (Menteri Sosial 2000- 2005)
6. Hendrik Setrowidjojo, (Menteri Sosial 2005- 2010 dan Menteri Pertanian, Peternakan, dan

Perikanan Suriname 2010- 2015)

7. Raymond Sapoen (Menteri Pendidikan pada tahun 2010-2012, dan Menteri Perdagangan dan industri dari 2012-2014)

Menteri- menteri diatas merupakan sebagian dari tokoh- tokoh yang berpengaruh dalam politik di Suriname. Selain di kementerian etnis Jawa berhasil menempatkan posisinya di parlemen, salah satu prestasi utama yaitu berhasilnya keturunan Jawa menjadi ketua parlemen Suriname, pada Pemilu tanggal 25 Mei 2005 telah berhasil memilih 8 orang Jawa menjadi anggota DPR dan sekaligus berhasil memilih Bapak Paul Salam Somohardjo sebagai ketua parlemen (DPR) (Komariah, 2011, hlm. 42). Keberhasilan Paul tidak saja menjadi ketua parlemen, juga pernah menjadi kandidat calon Presiden 2010-2015, keturunan Jawa lainnya yang serupa yaitu Raymond Sapoen sebagai calon Presiden Suriname 2015- 2016. Dampak etnis Jawa turut berpengaruh pada sistem demokrasi di Suriname, menurut Menke (2015, hlm. 139) Suriname memperoleh nilai 74,6 sebagai negara yang mampu menjalankan sistem demokrasi yang baik, diantara negara- negara di Amerika Latin.

SIMPULAN

Pertama, masyarakat Jawa yang menetap di Suriname mengalami perlakuan diskriminasi karena pemerintahan otonomi Suriname didominasi oleh etnis Pribumi, sehingga kebijakan- kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintahan otonomi lebih memfokuskan pada etnis pribumi, sedangkan etnis pendatang memperoleh kebijakan yang bersifat diskriminatif. Kondisi tersebut mendorong etnis Jawa untuk memperbaiki sistem

dengan cara masuk politik di Suriname, dengan mendirikan partai- partai yang berlatarbelakang etnis Jawa, seperti: seperti PBIS, KTPI, Pandawalima, Pertjajah Luhur.

Kedua, Suriname merupakan negara yang sering diguncang guncang kudeta militer, selama ini sudah dua kali terjadi pada tahun 1980 dan 1990. Pemerintahan mulai berjalan dengan baik pada tahun 1991, termasuk etnis Jawa yang turut ambil andil dalam perkembangan politik di Suriname. Suriname memiliki konstitusi yang mengatur perundang- undangan negara termasuk Pemilu, konstitusi tersebut dinamakan “Konstitusi Suriname 1987”, Pemilu diadakan setiap lima tahun sekali, tercatat Suriname telah menggelar Pemilu sebanyak enam kali pasca kudeta militer yang kedua, Pemilu 1991- 2015 diikuti oleh tiga poros partai, poros New Front (NF), NDP/ Millenium Combination dan partai- partai kecil. Pemerintahan dari tahun 1991- 2015, beberapa kali berpindah kekuasaan antara NF dan NDP, sedangkan poros ketiga yang terdiri dari partai kecil hanya sesekali berkoalisi kesalah satu poros pemenang.

Ketiga, keberadaan etnis Jawa dengan beberapa partai politiknya memberikan kontribusi terhadap politik di Suriname, setiap Pemilu digelar partai- partai etnis Jawa selalu tergabung dalam setiap poros, maka koalisi manapun yang berhasil memenangkan Pemilu tersebut etnis Jawa akan masuk dalam kabinet pemerintahan, sehingga pada tahun 1991- 2015 etnis Jawa selalu mendapatkan posisi menteri dalam susunan kabinet pemerintahan, sehingga berdampak pada kebijakan- kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintahan

Keempat, etnis Jawa berhasil menempati sebagai menteri, ketua parlemen dan calon Presiden, dampak lainnya menjadikan Suriname sebagai negara demokratis, karena setiap etnis di Suriname turut berperan dalam politik.

DAFTAR PUSTAKA

- Choenni, C.E.S. (2014). Ethnicity and politics: political adaption of Hindustanis in Suriname. *Journal sociological bulletin*, 63 (3), hlm. 407-431
- Coleman, D.Y. (2017). *Suriname Country Review*. Houston: CountryWatch Inc.
- Darmoko. (2016). Budaya Jawa dalam Diaspora: Tinjauan pada Masyarakat Jawa di Suriname. (Skripsi). Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta.
- Dwipusrandito, M. (1984). Suriname yang saya lihat. Jakarta: Prandya Paramita.
- Djalil, L. (1995, 9 Desember). Koloni Jawa di Amerika Latin. *Gatra*, 47- 62.
- Gottschalk, L.(1986). Mengerti sejarah. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Griffith, I. L. (2011). *The Re-Emergence of Suriname's Désiré (Desi) Bouterse: Political Acumen and Geopolitical Anxiety*. Miami: Applied Research Center Florida International University.
- Hardjo, S.M. (1989). Bunga rampai dari Suriname ke Tongar. Jakarta: Balai Pustaka.
- Ismael, Y. (1995). Indonesia pada pantai lautan Atlantik: tinjauan tentang kedudukan ekonomi dan sosial bangsa Indonesia di Suriname. Jakarta: Kementerian P.P dan K.
- Ismaun. (2005). Pengantar Sejarah Sebagai Ilmu dan Wahana Pendidikan. Bandung: Historia Utama Press.

- Kedutaan Besar RI Suriname. (2015). Suriname. Dapat diakses di <http://www.kemlu.go.id/paramaribo/id/default.aspx>
- Komariah, S. & Ruriana, P. (2011). Bahasa Jawa di Suriname: bahasa pengantar di radio Garuda. Surabaya: Lima- Lima Jaya.
- Kuntowijoyo. (1995). Metodologi sejarah. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Kusumo, B. N. J. (2011). Berbagai Bentuk Kerjasama Kebudayaan Indonesia-Suriname dalam Diplomasi Kebudayaan 2007- 2010. (Skripsi). FISIP, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- . (2013). Bentuk- bentuk Pemerintahan bahasa Jawa di Suriname. Surabaya: Balai bahasa Surabaya.
- Luk, N.G & Ahmadali, H. (2015). Access to Electoral Rights Suriname. Badia Fiesolana: EUDO Citizenship Observatory.
- Mell, P. (2015). Continuity through Diversity: The Surinamese Javanese Diaspora and the Homeland Anchorage. Institute for History, Leiden University, 13 (3), hlm. 95- 134.
- Menke, J. (2001). *Democracy and Governance in Multi-Ethnic Societies: The case of Suriname*. *Caribbean Dialogue Journal of Contemporary Caribbean Policy Issues*, hlm. 67- 84.
- . (2015). 2015 Elections in Suriname: a historical power shift. *Olhares Amazonicos: Revista Científica do Núcleo de Pesquisas Eleitorais e Políticas da Amazônia*, 2 (3), hlm. 658- 671.
- . (2014). *Suriname and The Limits of Consociationalism*. *Journal of Third World Studies*, 31 (1), hlm. 131- 148.
- Nay, J.R. (2010) Official Name: Republic of Suriname. Paramaribo: Americas Relief.
- Shute, G.B. (1995). Suriname: the nation against the state. *Current history: journal of contemporary world affairs*, 94 (585), hlm. 86-90.
- Singh, C. (2007). Reinining in The Military: *Re- Democratization in Suriname*. *Journal of Third World Studies*, 24 (1), hlm. 73- 96.
- Sjamsuddin, H. (2007). Metodologi Sejarah. Yogyakarta: Ombak
- Suparlan, P. (1995). *The Javanese in Suriname (ethnicity in an ethnically plural Society)*. Arizona: US Department of Education.
- Pool, M.S. & Fat. A.T.S. (2000). *The Constitution of The Republic of Suriname (Bulletin of Acts and Decrees 1987 NO. 166)*. Paramaribo: The Waterfront Press.